

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Jumat, 28 February 2020



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia Halaman 21	Jumat, 28 February 2020	JMSR & Sentraloka Akan Kembangkan Kawasan Industri Pintar	PT Jasa Marga Tbk. menargetkan pengembangan di Kawasan sekitar proyek jalan tol Jakarta-Cikampek Selatan menjadi Kawasan industri pintar setelah ditandatanganinya kerja sama dengan PT Sentraloka Adyabuana. Kesepakatan kerja sama tersebut ditandatangani oleh Direktur pengembangan Usaha Jasa Marga Ardian Priohutomo dan Direktur Utama Sentraloka Adyabuana Fadel Muhammad di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Rabu (26/2). Fadel merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (Okt. 2019-Okt. 2011) pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
2	Kompas Halaman 1	Jumat, 28 February 2020	Balai Besar Ingatkan DKI Benahi Drainase	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi hingga awal Maret. Terkait hal itu, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membenahi dan membereskan sejumlah drainase. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah, Kamis (27/2/2020), di Jakarta, menjelaskan, dalam beberapa kali hujan besar di Jakarta selama dua bulan terakhir, tiga di antaranya cukup besar dan mengakibatkan banjir. Banjir itu terjadi pada 1 Januari 2020, 23 Februari 2020, dan 25 Februari 2020.
3	Kompas Halaman 20	Jumat, 28 February 2020	Kawasan Kumuh di Pesisir Cirebon Ditata	Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, mulai menata daerah pesisir Panjunan yang kumuh menjadi destinasi wisata. Sekitar 105 bangunan bakal ditertibkan dan warga dipindahkan ke rumah susun. Warga terdampak berharap mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Kawasan kumuh yang akan ditata berada di RW 001 dan RW 010 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk. Lokasinya di bantaran Sungai Sukalila. Di Kawasan itu berdiri sejumlah rumah permanen, rumah semipermanen, kandang ayam, depot es dan tempat pembuangan sampah.
4	Kompas Halaman 21	Jumat, 28 February 2020	Peralihan Tata Ruang Picu Banjir	Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Kamis (27/2/2020), mengatakan, penyebab banjir di Kota Bekasi tak semata-mata dipengaruhi curah hujan tinggi. Namun, juga disebabkan pendangkalan Kali Bekasi sehingga tidak mampu menampung air, termasuk banjir kiriman dari Bogor. "Ada juga pembangunan bersekala nasional, seperti Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), LRT, Jalan Tol Becakayu, dan lainnya. Semua itu memiliki dampak dan kami prihatin ternyata KCIC ini tidak ada Amdal," katanya saat meninjau warga terdampak banjir di Perumahan Nasio, Kota Bekasi, kemarin.

Judul	JMSR & Sentraloka Akan Kembangkan Kawasan Industri Pintar	Tanggal	Jumat, 28 February 2020
Media	Bisnis Indonesia Halaman 21		
Resume	PT Jasa Marga Tbk. menargetkan pengembangan di Kawasan sekitar proyek jalan tol Jakarta-Cikampek Selatan menjadi Kawasan industri pintar setelah ditandatanganinya kerja sama dengan PT Sentraloka Adyabuana. Kesepakatan kerja sama tersebut ditandatangani oleh Direktur pengembangan Usaha Jasa Marga Ardian Priohutomo dan Direktur Utama Sentraloka Adyabuana Fadel Muhammad di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Rabu (26/2). Fadel merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (Okt. 2019-Okt. 2011) pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.		

| TOL JAKARTA-CIKAMPEK SELATAN |

JMSR & Sentraloka Akan Kembangkan Kawasan Industri Pintar

Bisnis, JAKARTA — PT Jasa Marga Tbk. menargetkan pengembangan di kawasan sekitar proyek jalan tol Jakarta—Cikampek Selatan menjadi kawasan industri pintar setelah ditandatanganinya kerja sama dengan PT Sentraloka Adyabuana.

Kesepakatan kerja sama tersebut ditandatangani oleh Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga Ardian Priohutomo dan Direktur Utama Sentraloka Adyabuana Fadel Muhammad di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Rabu (26/2).

Fadel merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (Okt. 2009—Okt. 2011) pada Kabinet Indonesia Bersatu

Jilid II.

Ketika dihubungi, Corporate Secretary PT Jasa Marga Tbk. (JSMR) Agus Setiawan mengatakan bahwa target pengembangan kawasan adalah kawasan industri pintar atau *smart industrial estate*.

"*Smart industry* yang tentu kemungkinan besar akan dikombinasikan dengan kawasan komersial dan logistik," ujarnya kepada *Bisnis*, Kamis (27/2).

Adapun, terkait dengan skema pengembangan, Agus menjelaskan bahwa hal itu masih akan dibicarakan antara kedua belah pihak.

"Bisa jadi dalam bentuk KSO [kerja sama operasional] atau pembentukan JV [*joint venture*]

dengan kepemilikan saham tertentu," katanya.

Agus menjelaskan bahwa properti komersial yang akan mewarnai perkembangan jalan tol Japek Selatan akan sangat banyak.

"Termasuk Jasa Marga Related Business yang salah satunya akan membangun atau pembuatan *rest area*," ujarnya.

Namun, ketika ditanya terkait dengan nilai investasi yang digelontorkan, Agus belum bisa mengungkapkannya.

"Besarnya investasi yang akan digelontorkan dalam pengembangan kawasan, masih dalam perhitungan," katanya.

Direktur Pengembangan JSMR Ardian Priohutomo mengatakan bahwa pengem-

bangkan kawasan merupakan bagian dari misi perusahaan.

Dia berharap agar pengembangan kawasan di koridor jalan tol dapat menjadi pengungkit bangkitan lalu lintas serta dapat menjadi *revenue stream* lainnya.

Perusahaan, katanya, memang memiliki pengalaman di jalan tol, tetapi untuk bisnis pengembangan kawasan, JSMR perlu belajar dari perusahaan yang memang sudah lebih berpengalaman dalam pengembangan kawasan seperti Sentraloka Adyabuana.

"Selain itu, yang paling utama adalah mereka juga telah memiliki lahan di sekitar koridor jalan tol Jakarta—Cikampek Selatan," jelas Adrian, melalui

keterangan tertulisnya kepada *Bisnis*, Kamis (27/2).

BERSIFAT BISNIS

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan bahwa kesepakatan antara Jasa Marga dengan Sentraloka Adyabuana bersifat bisnis.

Ketika ditanya terkait dengan perizinan dari BPJT untuk pengembangan kawasan di jalan tol itu, Danang menjelaskan bahwa pengembangan kawasan industri sudah memiliki prosedurnya sendiri di Kementerian Perindustrian, sedangkan untuk investasi ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal jika melibatkan investasi dari luar negeri.

"Apalagi ini lokasinya di *exit* dan *entry ramp* jalan tol," ujarnya kepada *Bisnis*, Kamis (27/2).

Terkait dengan potensi pengembangan kawasan di jalan tol lainnya, Danang mengungkapkan hingga saat ini belum ada rencana ke arah sana.

"Perlu hati-hati supaya tidak *over-investment* dan harus diperhatikan kapasitas jaringan, tidak hanya ruas per ruas," ujarnya.

Direktur Utama Sentraloka Adyabuana Fadel Muhammad ketika dimintai komentarnya mengenai kerja sama dengan JSMR melalui layanan pesan instan Whatsapp, hanya menjawab singkat. "Masih dalam proses." (Agne Yasa)

Judul	Balai Besar Ingatkan DKI Benahi Drainase	Tanggal	Jumat, 28 February 2020
Media	Kompas Halaman 1		
Resume	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi hingga awal Maret. Terkait hal itu, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membenahi dan membereskan sejumlah drainase. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah, Kamis (27/2/2020), di Jakarta, menjelaskan, dalam beberapa kali hujan besar di Jakarta selama dua bulan terakhir, tiga di antaranya cukup besar dan mengakibatkan banjir. Banjir itu terjadi pada 1 Januari 2020, 23 Februari 2020, dan 25 Februari 2020.		

BANJIR

Balai Besar Ingatkan DKI Benahi Drainase

JAKARTA, KOMPAS — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi hingga awal Maret. Terkait hal itu, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membenahi dan membereskan sejumlah drainase.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah, Kamis (27/2/2020), di Jakarta, menjelaskan, dalam beberapa kali hujan besar di Jakarta selama dua bulan terakhir, tiga di antaranya cukup besar dan mengakibatkan banjir. Banjir itu terjadi pada 1 Januari 2020, 23 Februari 2020, dan 25 Februari 2020.

Dari evaluasi BBWSCC, pada banjir 1 Januari 2020, sistem sungai berkontribusi 50 persen pada banjir dengan 33 titik banjir. Sementara sistem drainase menyumbang 50 persen pada bencana banjir juga dengan adanya 33 titik banjir.

Kemudian, pada banjir 23 Februari 2020, sistem sungai menyumbang 13,4 persen pada banjir Jakarta dengan adanya 12 titik banjir. Adapun sistem drainase menyumbang 86,6 persen pada banjir Jakarta dengan adanya 71 titik banjir.

Sementara itu, pada banjir 25 Februari 2020, sistem sungai menyumbang 35 persen pada banjir dengan 16 titik banjir. Sementara sistem drainase menyumbang 65 persen pada banjir dengan munculnya 30 titik banjir.

Kondisi ini, menurut Bambang, menunjukkan sistem drainase di wilayah Jakarta, mulai dari saluran besar hingga yang kecil, harus dibenahi. Mesti ada pengerukan dan pembersihan

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-2)

Balai Besar Ingatkan DKI

(Sambungan dari halaman 1)

rutin, mulai dari tingkat wilayah hingga permukiman sehingga manakala hujan terjadi, air bisa lancar mengalir.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf menjelaskan, setiap hari petugas di dinasny selalu melakukan pengerukan. Namun, ia mengakui ada drainase yang perlu dilebarkan.

Adapun terkait pemeliharaan sungai, Juaini menuturkan mesti berkoordinasi dengan BBWSCC selaku institusi yang berwenang atas pengelolaan 13 sungai di wilayah Jakarta. Bambang menyatakan setuju jika Dinas SDA DKI berkeinginan memelihara ke-13 sungai dan mempersilakan berkoordinasi dengan BBWSCC langsung.

Sementara itu, sesuai paman-tauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta per pukul 12.00 kemarin, jumlah pengungsi 5.158 jiwa yang tersebar di 45 pengungsian.

Di Makasar, Cipinang Melayu, Jakarta Timur, setelah selama tiga hari mengungsi di kompleks Masjid Universitas Borobudur, 1.080 warga Cipinang Melayu kembali ke rumah mereka, kemarin. Menurut Ke-

tua Lembaga Musyawarah Kelurahan Cipinang Melayu Subagio, belum selesainya normalisasi Kali Sunter menjadi pemicu banjir besar di daerahnya. Normalisasi terhenti pada 2016 dan hingga kini belum dilanjutkan lagi.

Gelar rapat

Saat meninjau banjir di Kota dan Kabupaten Bekasi, kemarin, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memanggil seluruh bupati, wali kota, dan balai besar wilayah sungai pada rapat Jumat hari ini. "Dalam rapat akan diambil keputusan, harus tanggap darurat dulu atau pembangunan permanen," ucapnya.

Banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Kota dan Kabupaten Bekasi hingga kemarin. Di kabupaten, sedikitnya 66 titik genangan tersebar di 18 kecamatan dengan ketinggian air 20-40 cm. Adapun total warga yang terdampak banjir sejak 25 Februari 2020 itu sebanyak 9.000 keluarga.

Kajian BPBD Kabupaten Bekasi menyebutkan, banjir yang meluas di daerah itu dipicu pembangunan perumahan yang mengabaikan ruang resapan air. (VAN/GIO/HLN/JOG)

Judul	Kawasan Kumuh di Pesisir Cirebon Ditata	Tanggal	Jumat, 28 February 2020
Media	Kompas Halaman 20		
Resume	Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, mulai menata daerah pesisir Panjunan yang kumuh menjadi destinasi wisata. Sekitar 105 bangunan bakal ditertibkan dan warga dipindahkan ke rumah susun. Warga terdampak berharap mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Kawasan kumuh yang akan ditata berada di RW 001 dan RW 010 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk. Lokasinya di bantaran Sungai Sukalila. Di Kawasan itu berdiri sejumlah rumah permanen, rumah semipermanen, kandang ayam, depot es dan tempat pembuangan sampah.		

PERKOTAAN

Kawasan Kumuh di Pesisir Cirebon Ditata

CIREBON, KOMPAS — Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, mulai menata daerah pesisir Panjunan yang kumuh menjadi destinasi wisata. Sekitar 105 bangunan bakal ditertibkan dan warga dipindahkan ke rumah susun. Warga terdampak berharap mendapatkan kompensasi dari pemerintah.

Kawasan kumuh yang akan ditata berada di RW 001 dan RW 010 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk. Lokasinya di bantaran Sungai Sukalila. Di kawasan itu berdiri sejumlah rumah permanen, rumah semipermanen, kandang ayam, depot es, dan tempat pembuangan sampah.

Pantauan Kamis (27/2/2020), air sungai berwarna kehitaman. Sungai itu berbatasan dengan Pelabuhan Cirebon yang melayani bongkar muat batubara. Sampah plastik juga menumpuk di muara yang dipadati perahu nelayan. Di sana terdapat tempat pelelangan ikan dan lapangan sepak bola.

"Kawasan ini ditata mulai April dan tuntas tahun ini. Nanti ada gapura, jalur pedestrian sepanjang sungai, pemadam kebakaran, sanitasi, dan *landmark*," ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cirebon Eddy Krisnowanto.

Penataan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR itu menggunakan APBN lebih dari Rp 10 miliar. "Kami mengurus sekitar 105 bangunan terdampak. Kami siapkan dana Rp 1,4 miliar. Cukup atau tidak, nanti dievaluasi," kata Eddy.

Penataan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional serta Peraturan Mendagri No 117/2018. Warga terdampak akan menerima santunan yang nilainya dihitung pihak independen. Adapun komponen dalam penentuan santunan meliputi biaya pembersihan di atas tanah, mobilisasi, sewa rumah paling lama 12 bulan, dan tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah.

"Tahun 2021, warga terdampak akan menempati rumah susun," ucapnya. Pemkot Cirebon masih mencari sumber dana pembangunan rusun yang mencapai Rp 25,8 miliar.

Ketua RW 010 Panjunan Suwarjono mengatakan, warga terdampak tidak menolak rencana penataan kawasan pesisir agar tidak lagi kumuh. "Namun, kami berharap Pemkot Cirebon dapat memberikan ganti rugi," katanya.

Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati mengatakan, pihaknya bersama Bank Pembangunan Asia (ADB) tengah menajaki rencana penataan kawasan pesisir di Kelurahan Lemahwungkuk dan Kasepuhan. Kawasan itu, menurut rencana, dilengkapi sanitasi, instalasi pembuangan limbah terpadu, air bersih, dan pengelolaan sampah.

"Kendala utama adalah penyediaan lahan. Kami akan mencari solusinya," ujar Eti saat menerima kunjungan perwakilan ADB di Balai Kota Cirebon.

Anastasia Carolina, Senior Project Officer ADB, mengatakan, penataan kawasan pesisir Cirebon itu sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional pemerintah pusat 2020-2024. "Kami sudah membuat draf studi kelayakan," katanya. (IKI)

Warga terdampak tidak menolak rencana penataan kawasan pesisir agar tidak lagi kumuh.

Judul	Peralihan Tata Ruang Picu Banjir	Tanggal	Jumat, 28 February 2020
Media	Kompas Halaman 21		
Resume	Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Kamis (27/2/2020), mengatakan, penyebab banjir di Kota Bekasi tak semata-mata dipengaruhi curah hujan tinggi. Namun, juga disebabkan pendangkalan Kali Bekasi sehingga tidak mampu menampung air, termasuk banjir kiriman dari Bogor. "Ada juga pembangunan berskala nasional, seperti Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), LRT, Jalan Tol Becakayu, dan lainnya. Semua itu memiliki dampak dan kami prihatin ternyata KCIC ini tidak ada Amdal," katanya saat meninjau warga terdampak banjir di Perumahan Nasio, Kota Bekasi, kemarin.		

Peralihan Tata Ruang Picu Banjir

Bencana banjir sudah empat kali melanda wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, sejak 1 Januari 2020. Salah satu penyebab banjir di wilayah itu adalah peralihan pemanfaatan tata ruang yang kian masif, termasuk untuk pembangunan proyek-proyek strategis nasional.

BEKASI, KOMPAS — Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Kamis (27/2/2020), mengatakan, penyebab banjir di Kota Bekasi tak semata-mata dipengaruhi curah hujan tinggi. Namun, juga disebabkan pendangkalan Kali Bekasi sehingga tidak mampu menampung air, termasuk banjir kiriman dari Bogor.

"Ada juga pembangunan berskala nasional, seperti Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), LRT, Jalan Tol Becakayu, dan lainnya. Semua itu memiliki dampak dan kami prihatin ternyata KCIC ini tidak ada Amdal," katanya saat meninjau warga terdampak banjir di Perumahan Nasio, Kota Bekasi, kemarin.

Uu menambahkan, banyaknya faktor pemicu banjir menunjukkan bahwa penyelesaian masalah banjir di Kota Bekasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga investor yang berinvestasi di Bekasi.

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengakui, proyek strategis nasional berdampak terhadap banjir di Kota Bekasi. Sepuluh tahun lalu, sisi kiri dan kanan jalan tol masih ada ruang terbuka hijau (RTH) yang kini beralih fungsi menjadi proyek strategis nasional.

"Ini adalah bagian dinamika kecepatan pembangunan belum mengantisipasi kecepatan penyediaan infrastruktur penangan banjir," katanya.

Tri menambahkan, banjir juga masih terus mengancam Kota Bekasi karena proses pembangunan jalan tol masih terus berlangsung. Hal itu menimbulkan penyempitan drainase sehingga memperparah banjir di Bekasi.

Selain persoalan proyek strategis nasional, Kota Bekasi



Genangan air dan lumpur yang tersisa di perumahan warga di Bumi Nasio, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (27/2/2020). Kawasan itu paling terdampak saat banjir melanda Kota Bekasi pada 25 Februari 2020.

juga masih kekurangan RTH. Hal ini turut menjadi penyebab Kota Bekasi terendam banjir sebanyak empat kali pada 2020 karena air dari perumahan warga semua mengalir ke sungai.

Ketersediaan RTH di Kota Bekasi hingga Februari 2020 baru 15 persen. Padahal, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan disebutkan, setiap kota ditargetkan memiliki 30 persen RTH.

"Jadi, sekarang bagaimana pemerintah menguasai tanah-tanah yang sampai sekarang belum dibangun (perumahan). Kami sedang berupaya membebaskan tanah sekitar 3-6

hektar. Tentu juga akan ada kontribusi RTH yang dimiliki publik," ujarnya.

Gelar rapat

Terkait penanganan masalah banjir, kata Uu, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan memanggil semua bupati, wali kota, dan balai besar wilayah sungai untuk menggelar rapat pada 28 Februari 2020.

"Di rapat nanti akan diambil keputusan, apakah harus tanggap darurat atau pembangunan permanen," ujarnya.

Adapun di Kota Bekasi direncanakan pembangunan polder air dan aliran Kali Bekasi dikeruk serta diperlebar atau yang biasa disebut pemerintah sebagai proyek normalisasi. Rencana pelaksanaan

juga dijanjikan untuk dilakukan secepatnya dengan memperhatikan aspek prosedur dan legalitas.

Banjir di Perbukit Damai

Masih terkait bencana banjir, warga Perumahan Perbukit Damai, Kelurahan Perbukit, Kota Tangerang, Banten, tidak bisa berlama-lama kembali menempati rumah setelah banjir surut. Hujan deras pada Kamis dini hari kembali merendam kediaman mereka.

"Ketinggian air di Perbukit Damai kembali naik. Padahal, sebelumnya sudah surut," ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Feby Darmawan.

Alhasil, Masjid Al Jihad di

Kelurahan Perbukit yang tadinya lengang ditinggal pengungsi kembali ramai. Mereka memenuhi hampir seluruh selasar masjid. Bantuan bahan makanan dan minuman menumpuk di dekat pintu gerbang masjid. Ibu-ibu terlihat sibuk mencuci dan menjemur pakaian di sekitar masjid. Sebagian pengungsi terlelap di atas tikar yang mereka gelar.

Jumlah pengungsi di Masjid Al Jihad mencapai 250 keluarga. Selain di masjid, sebagian pengungsi memutuskan tinggal di ruko-ruko sekitar. Beberapa di antaranya memilih menumpang di kediaman kerabat.

Setelah hujan deras selama berjam-jam pada Kamis dini hari, ketinggian air di Perumahan Perbukit Damai menca-

pai 30 sentimeter. Air berasal dari luapan Sungai Ledug dan Danau Situ Bulakan yang berlokasi di dekat perumahan.

Sungai dan danau yang meluap menyulitkan petugas BPBD untuk menyedot dan membuang air ke sana. Jika pun dipaksakan dibuang ke sungai atau danau, air akan kembali mengalir ke perumahan. Warga dan petugas hanya menunggu air di sungai dan danau kembali surut.

"Saya pikir, kemarin sudah aman balik ke rumah. Saat masak pagi harinya, tiba-tiba air kembali naik," kata Marsyah (58), salah seorang warga Perumahan Perbukit Damai, ditemui di lokasi pengungsian.

Sejauh ini, belum ada pengungsi yang dilaporkan mengalami sakit. Kebutuhan obat-obatan, makanan, air bersih, dan popok bayi tercukupi. Hanya, persediaan susu bayi dirasa belum memadai.

Selain Perumahan Perbukit Damai, banjir di Kota Tangerang masih terjadi di Perumahan Garden City. Bedanya, di perumahan ini belum surut pada tiga hari terakhir.

Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah menyampaikan, pihaknya terus berupaya menangani banjir di Perbukit. Salah satunya adalah menurunkan tiga ekskavator untuk mengeruk tanah di bagian bawah sungai untuk membuat kisdam sementara sepanjang 500 meter di sungai. "Ini salah satu upaya menahan limpasan Sungai Cirarab," kata Arief lewat siaran pers.

Namun, jumlah alat berat yang ada, menurut Arief, masih sangat kurang. Ia mengharapkan ada bantuan alat berat dari Pemprov Banten untuk mempercepat pengerjaan pembuatan kisdam sementara.

(VAN/IGA)

